

**TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAK  
PIDANA PENGHELAPAN SEPEDA MOTOR KREDIT  
(Studi Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2015/PN.Pwr)**

**SKRIPSI**

**Oleh :**

**I' anatul Umami**

**(C73214026)**



**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel  
Fakultas Syariah dan Hukum  
Jurusan Hukum Publik Islam Prodi Hukum Pidana Islam  
Surabaya  
2018**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : I' anatul Umami

NIM : C73214026

Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Publik Islam/ Hukum  
Pidana Islam

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak  
Pidana Penggelapan Sepeda Motor Kredit (Studi  
Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2015/PN.Pwr)

menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 03 April 2018

Saya yang menyatakan,



I' anatul Umami

NIM. C73214026

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh I'anutul Umami NIM C73214026 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 03 April 2018

Pembimbing



Moh. Hatta, M.HI.,

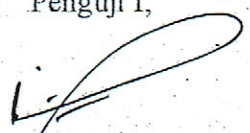
NIP. 197110262007011012

## PENGESAHAN

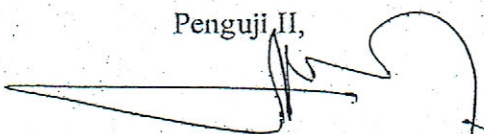
Skripsi yang ditulis oleh Panatul Umami NIM. C73214026 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Kamis tanggal 26 April 2018, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program strata satu dalam Ilmu Syaria'ah.

Majelis Munaqasah Skripsi :

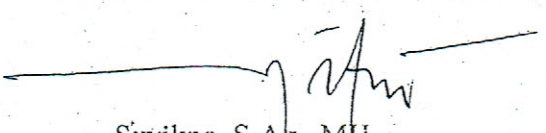
Penguji I,

  
Moh. Hatta, MHI.  
NIP. 19741026200711012

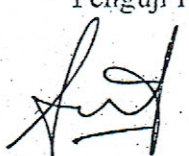
Penguji II,

  
Prof. Dr. Titik Triwulan Tutik, SH, MH.  
NIP. 196803292000032001

Penguji III,

  
Suyikno, S.Ag., MH.  
NIP. 197307052011011001

Penguji IV,

  
Ikhsan Fatah Yasin, SHL., MH.  
NIP. 198905172015031006


Surabaya, 26 April 2018

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,

  
Prof. Dr. H. Saiful HM., M.Ag., M.H.  
NIP. 196803091996031002





KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA  
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : I'anutul Umami  
NIM : C73214026  
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/ Hukum Publik Islam  
E-mail address : ianatulumami18@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :  
☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)  
yang berjudul :

TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA PENGHELAPAN

SEPEDA MOTOR KREDIT (Studi Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2015/PN.Pwr)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 2 Mei 2018

Penulis  
  
I'anutul Umami

## ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Sepeda Motor Kredit Nomor 15/Pid.Sus/2015/PN.Pwr”. Skripsi ini adalah hasil penelitian kepustakaan untuk menjawab pertanyaan bagaimana pertimbangan hakim terhadap tindak pidana penggelapan sepeda motor kredit dalam putusan Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 15/Pid.Sus/2015/PN.Pwr dan bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap tindak pidana penggelapan sepeda motor kredit dalam putusan Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 15/Pid.Sus/2015/PN.Pwr.

Data penelitian diperoleh dengan mengumpulkan data secara dokumentasi, yaitu cara memperoleh data dengan cara menelaah dokumen. Dengan cara membaca, mengkaji, merangkum, menulis dan mengumpulkan data yang berkaitan dengan Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2015/PN.Pwr tentang penggelapan sepeda motor kredit. Selanjutnya data diolah dan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis yakni memaparkan tentang tindak pidana penggelapan sepeda motor kredit yang dilakukan oleh terdakwa dengan dialihkan kepihak ketiga tanpa persetujuan dari pihak *leasing*. Setelah memaparkan kronologi maka selanjutnya dengan pola pikir deduktif untuk diambil kesimpulan.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa ada dua pertimbangan hakim dalam putusan ini yaitu pertimbangan yang bersifat yuridis yakni terdakwa dihukum dengan penjara selama 10 (sepuluh) bulan berdasarkan pasal 372 KUHP tentang penggelapan dan pertimbangan yang bersifat sosiologis yakni tidak hanya memberikan efek jera namun juga memuat unsur pendidikan. Selanjutnya untuk penggunaan pasal majelis hakim harus mempertimbangkan dengan benar, dalam hal kasus ini hakim menyampingkan asas *Lex Specialis Derogat Lex Generalis*, hakim bisa memutuskan perkara ini menggunakan undang-undang yang mengatur secara khusus yaitu pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia, karena melihat barang yang dialihkan merupakan sepeda motor yang menjadi objek jaminan fidusia dengan PT.ADIRA FINANCE. Menurut tinjauan hukum pidana Islam pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa pada putusan tersebut, sudah sesuai karena termasuk dalam kategori hukuman *jarimah ta'zir* dan belum ada ketentuan *naş* yang mengatur secara eksplisit tentang hukuman kejahatan pada putusan tersebut, sehingga dalam menjatuhkan hukuman diberikan sepenuhnya kepada hakim atau dalam hal ini *ulil amri*.

Saran yang dapat di sampaikan adalah dalam memutuskan suatu perkara tidak luput dalam penentuan penggunaan pasal dan juga Undang-Undang, majelis hakim harus memperhatikan ketentuan-ketentuan dari segi formil maupun materiil. Dan lebih teliti dalam menjatuhkan hukuman, khususnya penggunaan pasal dan Undang-Undang yang digunakan. Karena untuk membuat masyarakat percaya dalam persidangan adalah keprofesionalan dan keadilan dalam menjalankan tugas bagi aparat penegak hukum.









# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perubahan zaman yang terus berkembang membuat manusia menjadi manusia yang lebih modern dan dinamis, sehingga membawa masyarakat menuju suatu tatanan kehidupan dan gaya hidup yang serba praktis dan cepat. Untuk aktifitas dalam kehidupan sehari-hari manusia mempunyai kebutuhan yang harus dipenuhi demi mempertahankan hidupnya. Situasi demikian menghendaki kepada setiap manusia untuk melakukan hubungan kerjasama dengan individu lain. Bentuk kerjasama antara individu tersebut terdiri dari berbagai macam keadaan dengan kebutuhan masing-masing.

Dampak adanya perubahan pada era globalisasi ini tidak hanya mempengaruhi dari sisi perubahan yang menjadi keharusan, akan tetapi berpengaruh pula pada semua bidang dalam kehidupan manusia seperti teknologi, alat-alat transportasi, dan informasi. Karena kemajuan teknologi selalu menjadi ciri khas dari peradaban yang semakin berkembang pesat di muka bumi ini. Tidak hanya membawa dampak positif bagi kehidupan manusia dimana perkembangannya dalam bidang teknologi, alat-alat transportasi, dan informasi sangat membantu manusia dalam kehidupan sehari-harinya. Manusia tidak perlu lagi menghabiskan banyak waktu untuk memenuhi segala kebutuhannya karena difasilitasi oleh kecanggihan dari

modernisasi tersebut. Akan tetapi, pengaruh modernisasi ini juga membawa dampak negatif terutama dalam pemenuhan gaya hidup. Sedangkan gaya hidup yang didasari pada modernisasi tentu membuat manusia berperilaku lebih konsumtif.

Gaya hidup yang konsumtif berlebihan tentu perlu dukungan keadaan materi dari manusia itu sendiri. Agar tidak sampai terjadi lebih besar pengeluaran daripada pemasukan. Namun Faktanya, terdapat banyak manusia yang seakan lupa bahwa perilaku konsumtif yang berlebihan akan merugikan diri sendiri. Seperti halnya sebagai berikut, karena mengikuti perkembangan zaman yang selalu mengikuti teknologi industri salah satunya yaitu sepeda motor, tidak dapat dipungkiri bahwa kebutuhan terhadap sepeda motor ini tidak lagi didominasi oleh mereka yang mempunyai harta kekayaan atau uang saja, tetapi juga mereka yang kurang memiliki kekayaan atau uang sehingga dengan usaha melakukan kredit sepeda motor.

Saat ini kebutuhan sepeda motor telah masuk ke wilayah bagi masyarakat yang mempunyai ekonomi menengah bahkan masyarakat yang mempunyai ekonomi lemah. Bukan faktor penghalang lagi adanya perbedaan yang mempunyai uang atau mereka yang kurang memiliki uang yang cukup untuk membeli sepeda motor. Karena berbagai macam cara ditawarkan oleh para pengusaha untuk menawarkan barang dagangannya termasuk pengusaha sepeda motor atau dealer motor.

Usaha yang ditawarkan oleh pengusaha sepeda motor atau lembaga pembiayaan (*leasing*) terdiri dari berbagai cara yang dapat menarik para

konsumen untuk membeli sepeda motor. Salah satu cara yang banyak di masyarakat dan dianggap mudah oleh masyarakat untuk secepatnya dapat memiliki sepeda motor dengan melalui perjanjian jual beli yaitu kredit motor. Dalam hal ini, tidak ada lagi istilah yang menyatakan bahwa yang dapat memiliki sepeda motor hanya mereka yang memiliki kemampuan membeli sepeda motor. Siapapun dapat memiliki sepeda motor, asalkan ada keinginan untuk mau terikat pada perjanjian kredit jual beli dengan dealer sepeda motor, karena sekarang banyak lembaga pembiayaan (*leasing*) yang bekerja sama dengan dealer antara lain ADIRA FINANCE, FIF, SPS, dsb. .

Bentuk kemudahan yang telah diberikan oleh dealer sepeda motor yang bekerja sama dengan pihak lembaga pembiayaan (*leasing*) tersebut membawa daya tarik sendiri dalam kehidupan masyarakat untuk bersaing dengan berlomba-lomba mengajukan perjanjian kredit sepeda motor. Peredaran dan kepemilikan sepeda motor menjadi lebih mudah, asalkan mengikuti prosedur perjanjian kredit tersebut. Namun, kemudahan dari pengusaha sepeda motor atau dealer sebagai bentuk niat baik kepada masyarakat kaum menengah kebawah untuk dapat memperoleh kredit sepeda motor tidak diimbangi dengan niat baik dari konsumen atau mereka yang telah terikat dalam perjanjian jual beli untuk memenuhi apa yang telah menjadi kewajiban mereka. Kondisi tersebut tentu membuat pihak lembaga pembiayaan (*leasing*) yang bekerjasama dengan dealer sepeda motor mengalami kerugian yang sangat besar.



Adanya permasalahan dalam perjanjian kredit sepeda motor tersebut tidak jarang bahkan sering menjadi persoalan hukum pidana, padahal idealnya perjanjian kredit merupakan bagian dari ranah hukum perdata. Namun, hukum pidana akan hadir manakala dalam perjanjian tersebut timbul perbuatan yang termasuk dalam kategori hukum pidana. Seperti halnya ketika masyarakat gelap mata, maka akan menempuh jalan “pintas” untuk memenuhi kebutuhannya tersebut ketika dalam perjanjian kredit atau jual beli sepeda masyarakat tidak mampu memenuhi salah satu prestasi dalam perjanjian. Salah satunya adalah dengan melakukan tindak pidana penggelapan sebagai jalan pintas tersebut, bahkan dengan cara mengalihkan menggadaikan, atau menyewakan dengan tanpa persetujuan kedua belah pihak.

Tindak kejahatan yang marak terjadi yakni tindak pidana penggelapan sebagaimana yang diatur dalam pasal 372 sampai dengan pasal 377 KUHP. Tindak pidana sebagaimana tersebut sebagai “penyalah-gunaan kepercayaan”. Sebab, inti dari tindak pidana yang diatur dalam pasal tersebut adalah “penyalahgunaan hak” atau “penyalahgunaan kepercayaan”.<sup>1</sup> Dalam hal ini, penyalahgunaan kepercayaan yang mendominasi sebagai unsur utama terjadinya tindak pidana penggelapan. Tindak pidana penggelapan merupakan kejahatan yang berawal dari adanya suatu kepercayaan pada orang lain, dan kepercayaan tersebut hilang karena lemahnya suatu kejujuran. Tindak pidana yang berhubungan dengan harta kekayaan dan menyebabkan kerugian materi

---

<sup>1</sup> Ahmad Abu Abdul Halim, *Suap, Dampak dan Bahayanya*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1996)

Tindak pidana penggelapan yang merupakan kejahatan yang sering sekali terjadi dan dapat terjadi di segala bidang bahkan pelakunya di berbagai lapisan masyarakat, baik dari lapisan bawah sampai masyarakat lapisan atas pun dapat melakukan tindak pidana ini. Menilik banyaknya kasus yang terjadi di Indonesia tentang kejahatan penggelapan ini tentunya hal ini sangat memprihatinkan. Seharusnya, hal ini tidak sampai terjadi, apabila seseorang bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan kepadanya. Menjaga kepercayaan dan bertindak sesuai dengan wewenang yang diberikannya maka akan menjauhkan seseorang dari tindak pidana penggelapan.

Sehubungan dengan pembahasan di atas, Penelitian yang akan penulis lakukan ini terkait dengan putusan Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 15/Pid.Sus/2015/PN.Pwr tentang tindak pidana penggelapan sepeda motor kredit yang dilakukan oleh debitur (terdakwa) dialihkan ke pihak ketiga tanpa

[illegible]

Dalam hukum pidana Islam suatu perbuatan baru dianggap sebagai tindak pidana apabila unsur-unsurnya telah terpenuhi. *Jarimāh* (tindak pidana) adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara', yang diancam dengan hukuman *had* atau *ta'zīr*.<sup>4</sup> *Ta'zīr* adalah hukuman yang dijatuhkan

<sup>4</sup> Kemal Pasha, Mustofa, *Fiqh Islam*, (Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri, 2002), 20.

Dalam hukum Islam masalah penggelapan sepeda motor tidak disebutkan dengan jelas dalam al-Qur'an dan al-Hadist akan tetapi bukan berarti Islam tidak mengatur masalah ini. Justru diperlukan penggalian atau penafsiran dari al-Qur'an untuk menemukan hukum dari masalah ini. Hukum Islam merupakan hukum yang bersumber dari al-Qur'an dan al-Hadist. Apapun bentuk tindak kejahatan yang dilakukan oleh manusia pasti ada hukumannya. Di dalam surat al-Imran ayat 161 dikisahkan terdapat budak yang bernama Mid'am atau Kirkirah menggelapkan mantel, ia adalah budak yang dihadiahkan kepada Nabi Muhammad Saw. Beliau kemudian mengutusnyaa untuk membawakan sejumlah harta rampasan perang. Ketika sampai di Was al-Qur'an, tidab-tiba lehernya terkena anak panah dan tewas ditempat. Para sahabat mendoakan budak tersebut. Namun, Rasulullah berujar, "Tidak, ia tidak akan masuk surga" kemudian para sahabat terkejut. Dari kisah tersebut Rasulullah menyuruh orang-orang unbtuk menshalatkan jenazah tersebut, Rasulullah tidak berkenan untuk menshalati jenazah seorang yang telah melakukan *ghulul* (penggelapan), sehubungan dengan itu Imam Al-nawai mengatakan bahwa orang baik tidak perlu menshalati orang fasik agar menjadi pelajaran dan mencegah orang lain agar tidak meniru menjadi fasik.<sup>6</sup> Hal tersebut, berarti bahwa tindak pidana pada putusan yang akan penulis bahas merupakan *jarimah* (tindak pidana) *ta'zir*, karena

<sup>6</sup> M.Nurul Irfan, Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta : AMZAH, 2013), 192









- <sup>8</sup> Tarsisius Sigit Hariprabowo, *Tinjauan Yuridis Kriminologis Terhadap Kejahatan Penggelapan Sepeda Motor di PT. Federal International Finance (FIF) Cabang Yogyakarta*, (Yogyakarta, Universitas Atmajaya, 10 Oktober 2012).



Mengingat jenis tindak pidana kejahatan penggelapan sangat banyak, baik yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur secara umum dan ada Undang-Undang yang mengatur secara khusus salah satu adanya Undang-Undang Jaminan Fidusia yang mengatur secara khusus, kasus yang penulis angkat yakni penggelapan sepeda motor kredit yang telah menjadi objek jaminan perjanjian Fidusia. Maka Penulis membahas penggelapan dari unsur-unsur yang ada, agar bisa membedakan tentang penerapan pasal Undang-undang yang khusus atau Undang-Undang yang umum. Mengenai bagaimana hukuman bagi pelaku tindak pidana penggalapan ketika sepeda motor telah menjadi objek jaminan perjanjian fidusia telah dialihkan oleh terdakwa tanpa persetujuan kedua belah pihak. Apakah menggunakan pasal 372 KUHP tentang penggelapan atau menggunakan pasal 36 tentang ketentuan pidana pada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 mengenai jaminan fidusia.

[illegible]

## G. Kegunaan Hasil Penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian, penulis ingin mempertegas kegunaan hasil penelitian yang ingin dicapai dalam skripsi ini sekurang-kurangnya dalam dua aspek yaitu :

- a. Sebagai upaya bagi menambah dan memperkaya khazanah keilmuan, khususnya di bidang tindak pidana Islam yang berkaitan dengan masalah tindak pidana penggelapan sepeda motor kredit.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian dalam penelitian-penelitian selanjutnya, khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana penggelapan sepeda motor kredit sebagai jaminan perjanjian fidusia.



- “Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.

Penggelapan juga merupakan suatu kejahatan yang hampir mirip sama dengan pencurian dalam pasal 362 KUHP.<sup>11</sup> Bedanya ialah bahwa pada pencurian barang yang dimiliki itu masih belum berada dalam tangan pencuri dan masih harus diambilnya, sedangkan pada penggelapan waktu memilikinya barang itu sudah ada di tangan pembuat tidak dengan jalan kejahatan.<sup>12</sup> Yang penulis maksud disini adalah penggelapan sepeda motor kredit sebagai objek jaminan fidusia yang dilakukan oleh terdakwa dengan dialihkan kepada pihak ketiga tanpa ada persetujuan dari pihak kreditur atau penerima fidusia.

3. Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2015/PN.Pwr tentang tindak pidana penggelapan sepeda motor kredit yang berasal dari Pengadilan Negeri Purworejo.

<sup>12</sup> R. Soesilo, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*, (Bogor : PT. Karya Nusantara, 1984), 130-131









## J. Sistematika Pembahasan

Bab pertama berupa pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

[illegible]



## BAB II

### TEORI *JARĪMAH TA'ZĪR*, PENGGELAPAN DALAM KUHP DAN PENGGELAPAN DALAM FIQH JINAYAH

#### A. Konsep *Jarīmah*

##### 1. Definisi *Jarīmah*

Menurut istilah *jarīmah* adalah larangan Syara' yang diancam oleh Allah SWT dengan hukuman *had* atau *ta'zīr*.<sup>15</sup> Larangan-larangan tersebut adakalanya ketika mengerjakan perbuatan yang dilarang, atau meninggalkan perbuatan yang diperintahkan, para fuqaha memberikan contoh meninggalkan kewajiban seperti menolak membayar zakat, tidak membayar hutang padahal sudah mampu untuk membayarnya, mengkhianati amanah, seperti menggelapkan titipan, manipulasi harta anak yatim, hasil wakaf dan lain sebagainya. Misalnya mengerjakan perbuatan yang dilarang seperti sumpah palsu, penipuan jual beli.

Dalam hukum Islam, kejahatan disebut dengan *jarīmah/jinayah yang* didefinisikan sebagai larangan-larangan hukum yang diberikan Allah, dan pelanggarannya membawa hukuman yang ditentukan-Nya. Dengan demikian suatu kejahatan adalah perbuatan yang hanya dilarang oleh Syari'at. Dengan

---

<sup>15</sup> Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1993) Cet. Ke-5. 1.



kata lain, melakukan (*commission*) atau tidak melakukan (*ommission*) suatu perbuatan yang membawa kepada hukuman yang ditentukan oleh syari'at adalah kejahatan.<sup>16</sup>



barang milik orang lain. Tindakan tersebut merupakan tindakan material yaitu perilaku yang membentuk tindak pidana.

- 3) *Al-rukn al-adabi* (Unsur Moral) artinya pelaku tindak pidana harus orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Setiap *jarimah* hanya dapat dihukum, ketika sudah memenuhi ketiga unsur-unsur tersebut.<sup>20</sup>

- b. Unsur khusus *jarimah* adalah unsur-unsur yang hanya terdapat pada jenis *jarimah* tertentu dan tidak terdapat pada jenis *jarimah* yang lain. Sebagai contoh, mengambil harta orang lain secara diam-diam dari tempatnya dalam *jarimah* pencurian, atau menghilangkan nyawa manusia oleh manusia lainnya dalam *jarimah* pembunuhan.

### 3. Macam – Macam *Jarimah*

- a. Ditinjau dari segi berat ringanya hukuman, *jarimah* dibagi menjadi tiga bagian<sup>21</sup> :

- 1) *Jarimah Hudud* adalah suatu pelanggaran dimana hukuman khusus dapat diterapkan secara keras tanpa memberikan peluang untuk dipertimbangkan, baik lembaga, badan maupun seseorang.<sup>22</sup> *Jarimah* hudud meliputi perzinaan, *qadzaf* (menuduh zina), minum *khamr*

<sup>20</sup> A. Djazuli, *Fiqh Jinayah, Upaya Menanggulangi dalam Islam* ., 24.

<sup>21</sup> Ibid., 77.

<sup>22</sup> Sahid, *Epistemologi Hukum Pidana Islam, Dasar-dasar Fiqh Jinayah*, (Surabaya: Pustaka Idea, 2015) 13.

(meminum minuman keras), pencurian, perampokan, pemberontakan, dan murtad.

- 2) *Jarimah Qisas/diyat*, *Qisas* adalah memberikan hukuman kepada pelaku perbuatan persis seperti apa yang dilakukan terhadap korban. Sedangkan *diyat* adalah harta yang diberikan kepada korban keluarganya, bukan kepada pembendaraan negara. *Diyat* bisa dikatakan mirip dengan ganti kerugian, besarnya dapat berbeda beda menurut perbedaan sengaja atau tidaknya *jarimah* yang dilakukan oleh pelaku. *Diyat* dikatakan hukuman karena *diyat* merupakan balasan dari *jarimah*. Jika korban memaafkan *diyat* tersebut maka hukuman diganti dengan hukuman *ta'zir*.<sup>23</sup> *Jarimah qisas/diyat* meliputi : pembunuhan sengaja, pembunuhan semi sengaja, pembunuhan bersalah/tidak sengaja, penganiayaan sengaja, dan penganiayaan tidak sengaja.
- 3) *Jarimah Ta'zir* adalah pelanggaran yang merujuk kepada kekuasaan kebijaksanaan penguasa, para hakim, dan wakil-wakilnya untuk memperbarui dan mendisiplinkan mereka. Tindak pidana yang diancam dengan hukuman *ta'zir* adalah setiap tindak pidana selain tindak pidana hudud, *qisas* dan *diyat*. Karena ketiga tindak pidana tersebut memiliki hukuman yang telah ditentukan bentuk dan

---

<sup>23</sup> Ibid.,14.

jumlahnya oleh syara'. Ketika hukuman *ta'zīr* dijatuhkan atas ketiga tindak pidana tersebut, hukuman tersebut tidak dikategorikan sebagai hukuman pokok, melainkan hukuman pengganti yang harus dijatuhkan ketika terhalangnya hukuman pokok.<sup>24</sup> *Jarīmah ta'zīr* terbagi menjadi tiga bagian :

- a) *Jarīmah Hudud/ Qīṣaṣ/ Dīyat* yang subhat tidak memenuhi syarat, namun sudah merupakan maksiat. Misalnya, percobaan pencurian, percobaan pembunuhan, pencurian dikalangan keluarga, pencurian aliran listrik.
- b) *Jarīmah – Jarīmah* yang ditentukan oleh al-Qur'an dan al-Hadis, namun tidak ditentukan sanksinya. Misalnya, penghinaan, sanksi palsu, tidak melaksanakan amanah, dan menghina agama.
- c) *Jarīmah – Jarīmah* yang ditentukan oleh ulil amri untuk kemaslahatan umum. Dalam hal ini, nilai ajaran Islam dijadikan pertimbangan penentuan kemaslahatan umum. Persyaratan kemaslahatan ini terinci secara terinci diuraikan dalam bidang studi ushul fiqh. Misalnya, pelanggaran atas peraturan lalu lintas.<sup>25</sup>

<sup>24</sup> Akhsin Sakho Muhammad, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam III*, (Bogor : PT Karisma ilmu, tt). 85.

<sup>25</sup> A. Djazuli, *Fiqh Jinayah, Upaya Menanggulangi dalam Islam*.13.





dilarang dan perbuatan tersebut terjadi sebagai akibat kesalahannya.<sup>31</sup>

kesalahan atau kekeliruan terdapat dua macam :

a) Pelaku sengaja melakukan perbuatan yang pada akhirnya menjadi *jarimah*, tetapi *jarimah* ini sama sekali tidak diniatkannya.

Terdapat dua macam lagi. *Pertama*, keliru dalam perbuatan. Misalnya, orang yang melempar batu karena merintangi jalanya, tetapi kemudian mengenai orang lain yang kebetulan lewat di jalan yang sama. *Kedua*, keliru dalam dugaan. Misalnya, seorang pemburu menembak sasarnya yang disangkanya binatang, tetapi kenyataanya ia adalah manusia.

b) Pelaku tidak sengaja berbuat dan *jarimah* yang terjadi tidak diniatkannya. *Jarimah* tersebut terjadi sebagai akibat kelalaiannya atau ketidak hati-hatianya. Misalnya, seseorang sedang tidur dan jatuh mengenai orang lain sehingga meninggal.<sup>32</sup>

c. Ditinjau dari segi waktu tertangkap, *jarimah* dibagi menjadi dua:<sup>33</sup>

1) *Jarimah* tertangkap basah. Maksudnya adalah *jarimah* yang pelakunya tertangkap pada waktu melakukan perbuatan tersebut atau sesudahnya tetapi dalam waktu dekat.

<sup>31</sup> A. Djazuli, *Fiqh Jinayah, Upaya Menanggulangi dalam Islam* ..13.

<sup>32</sup> Sahid, *Epistemologi Hukum Pidana Islam, Dasar-dasar Fiqh Jinayah* ..17.

<sup>33</sup> Ahmad Wardi Muslich, *pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam: Fikih Jinayah* ..23.

- 2) *jarimah* yang tidak tertangkap basah adalah *jarimah* yang tidak tertangkap ketika sedang melakukan, melainkan setelah kejadian.
- d. Ditinjau dari segi objek atau korban kejahatan, *jarimah* dibagi menjadi dua macam:
- 1) *Jarimah* perorangan. Adalah *jarimah* yang hukumannya ditetapkan untuk melindungi kemaslahatan perseorangan (individu).
  - 2) *Jarimah* Masyarakat. Adalah *jarimah* yang hukumnya ditetapkan untuk melindungi kepentingan masyarakat, baik *jarimah* itu berkenaan dengan individu, masyarakat ataupun ketentraman masyarakat dan tata aturanya.
- e. Ditinjau dari segi karakter, *jarimah* dibagi menjadi dua macam<sup>34</sup> :
- 1) *Jarimah* politik. Menurut Abu Zahrah, *jarimah* politik adalah pelanggaran terhadap peraturan pemerintah, terhadap pejabat pemerintah, atau terhadap garis-garis (ideologi) politik yang telah ditentukan oleh pemerintah. Kesimpulannya bahwa *jarimah* politik yang dilakukan untuk merealisasikan tujuan politik atau faktor pendorongnya adalah politik

---

<sup>34</sup> Sahid, *Epistemologi Hukum Pidana Islam, Dasar-dasar Fiqh Jinayah....* 20-21.



merupakan hukuman ketiga setelah hukuman *qīṣaṣ-dīyat* dan hukuman hudud. Makna dari *ta'zīr* bisa diartikan sebagai mengagungkan dan membantu, yang berasal dari kata *tu'azziruhu* dalam firman Allah SWT.

لَتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ۖ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ﴿٩﴾

“supaya kamu sekalian beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, menguatkan (agama)Nya, membesarkan-Nya. dan bertasbih kepada-Nya di waktu pagi dan petang.” (Q.S. Al-Fath ayat 9).

## 2. Dasar Hukum Pemberlakuan *Ta'zīr*

Dasar hukum disyariatkannya *ta'zīr* terdapat dalam beberapa hadis Nabi Saw dan tindakan-tindakan para sahabat. Hadis-hadis tersebut adalah sebagai berikut :

Hadis pertama, sebagaimana dikutip oleh Sayyid Sabiq, dalam kitab fiqh Al-Sunnah :

عَنْ بَحْزَنِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَبَسَ رَجُلًا فِي تَهْمَةٍ

“Dari Bahz bin Hakim dari ayahnya dari kakeknya bahwasanya Nabi saw, menahan seseorang karena disangka melakukan kejahatan. (HR. Abu Dawud, Al-Tirmidzi, Al-Nasa’i dan Baihaqi. Dishahihkan oleh Hakim).<sup>37</sup>

<sup>37</sup> Al-Sayid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1980), Jilid II, 497.

selanjutnya hadis kedua dan ketiga yang mengutip adalah Muhammad bin Isma'il Al-Kahlani, dalam kitab Subul Al-Salam, berikut bunyi hadis tersebut :

عَنْ أَبِي بُرْدَةَ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يُجْلِضُ أَحَدٌ فَوْقَ

عَشْرَةِ أَسْوَاطٍ إِلَّا فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ

“Dari Abi Burdah Al-Anshari bahwa ia mendengar Rasulullah saw bersabda “Tidak boleh dicambuk lebih dari sepuluh kali, kecuali didalam hukuman yang telah ditentukan oleh Allah SWT.” (HR. Muttafaq ‘Alaih).<sup>38</sup>

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْبِلُوا ذَوِي الْهَيْئَاتِ

عَثْرًا تَحْمِلُ إِلَّا الْحُدُودَ

“Dari Aisyah ra. bahwa Nabi saw bersabda, “Ringkanlah hukuman bagi orang-orang yang tidak pernah melakukan kejahatan atas perbuatan mereka, kecuali dalam *Jarimah-Jarimah* hudud. (HR.Ahmad, Abu Dawud, Al-Nasa’i dan Al-Baihaqi).

Dari ketiga hadis tersebut secara umum menjelaskan tentang eksistensi *ta'zir* dalam syariat Islam.

- a. Hadis pertama menjelaskan tentang tindakan Nabi yang menahan seseorang yang diduga melakukan tindak pidana dengan tujuan untuk memudahkan proses penyelidikan. Apabila tidak ditahan, dikhawatirkan

<sup>38</sup> Muhammad bin Isma'il Al-Kahlani, Subul Al-Salam, (Mesir: Maktabah Mushthafa Al-Bab Al-Halabi, 1960), jilid IV, 37.

orang tersebut melarikan diri, menghilangkan barang bukti, atau mengulangi perbuatan tindak pidana.

- b. Hadis kedua menjelaskan tentang batas hukuman *ta'zīr* yang tidak boleh lebih dari sepuluh cambukan untuk membedakannya dengan *jarīmah* hudud. Dengan batas hukuman ini dapatlah diketahui mana yang termasuk *jarīmah* hudud dan mana yang termasuk *jarīmah ta'zīr*. Menurut al-Kahlani, para ulama sepakat bahwa yang termasuk *jarīmah* hudud adalah zina, *qadzf*, murtad, minum *khamr*, pemberontakan, pencurian dan hirabah. Adapun *jarīmah qīṣaṣ-dīyat* terdiri atas pembunuhan dan penganiayaan. Selain dari *jarīmah-jarīmah* tersebut, termasuk *jarīmah ta'zīr* meskipun ada juga beberapa *jarīmah* yang dipersilihkan oleh para fuqaha seperti liwath, homoseksual atau lesbian.
- c. Hadis yang ketiga mengatur tentang teknis pelaksanaan hukuman *ta'zīr* yang bisa jadi berbeda-beda penerapannya, berdasarkan status pelaku dan hal lainnya.

Tindakan sahabat yang dapat dijadikan dasar hukuman untuk *jarīmah* dan hukuman *ta'zīr* antara lain tindakan Sayyidina Umar Ibn Khattab yang sedang melihat orang menelentangkan seekor kambing kemudian dia mengasah pisaunya. Khalifah Umar memukul orang tersebut dengan cemeti dan ia berkata: “asah dulu pisau itu”.<sup>39</sup>

---

<sup>39</sup> Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Teras, 2009), 182-185.







Ulama Hanafiyah secara umum membolehkan hukuman mati sebagai *ta'zīr* dengan menamakan hukuman ini sebagai hukuman politik (siyasah). Sebagian Ulama Hanabilah, khususnya Ibnu Taimiyah dan muridnya, Ibnu Qayyim, dan sebagian kecil ulama Malikiyah, menyetujui pendapat ini, kebanyakan tindak pidana yang diperbolehkan oleh ulama Hanafiyah untuk dijatuhi hukuman mati, baik sebagai hukuman *ta'zīr* maupun hukuman politik, oleh ulama madzhab yang lain dianggap sebagai hukuman *hudūd* atau *qishāsh*. Karena itu, apa yang dianggap sebagai suatu pelanggaran dalam madzhab Hanafi, itu tidak lain merupakan pelanggaran yang jelas. Misalnya, Ulama' Hanafiyah memperbolehkan penjatuhan hukuman mati sebagai hukuman *ta'zīr* terhadap tindak pidana pembunuhan dan tindak pidana homo seksual.

[illegible]



a) Hukuman penjara terbatas, berlaku untuk pidana *ta'zīr* biasa dan tindak pidana ringan. Batas terendah hukuman ini adalah selama satu hari, sedangkan batas tertinggi tidak ada kesepakatan para fuqaha. Sebagian ulama menyebutkan batas tertinggi tidak lebih dari enam bulan, sebagian lain berpendapat diserahkan kepada penguasa.

- 2) pengasingan.

[illegible]





barang yang dipinjamnya. Dalam hukum Islam, suatu perbuatan baru dianggap sebagai tindak pidana (*jarimah*) apabila unsur-unsur telah terpenuhi.

Dalam Fiqh Jinayah penggelapan juga disebut dengan *al-ghulul*, *al-ghulul* dijelaskan pada QS. Al-Imran ayat 161:

وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَمَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا  
كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿١٦١﴾

“tidak mungkin seorang Nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Barangsiapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang itu, Maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu, kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan (pembalasan) setimpal, sedang mereka tidak dianiaya.”

Kemudian dalam hadits HR.Abu Dawud menceritakan adanya seorang budak yang bernama Mid'am atau Kirkirah menggelapkan mantel. Ia adalah budak yang dihadiahkan kepada Rasulullah, beliau mengutusnyanya untuk membawakan sejumlah harta rampasan perang ketika membawakan sejumlah harta rampasan perang ketika sampai di Wad Al-Qura, tiba-tiba lehernya terkena anak panah dan tewas ditempat. Para sahabat mendoakan jenazah tersebut namun Rasulullah berujar “ Tidak, ia tidak akan masuk surga”.

Rasulullah juga tidak berkenan menshalatkan sahabatnya yang meninggal ketika penaklukan khaibar, karena sahabat tersebut telah

menggelapkan harta rampasan perang di jalan Allah. Sehubungan dengan kisah tersebut menurut Imam Al-Nawawi mengatakan bahwa orang baik tidak perlu menyalatkan orang yang fasik agar menjadi pelajaran dan mencegah orang agar tidak meniru menjadi fasik.<sup>45</sup>

## 2. Unsur-unsur Penggelapan dalam Hukum Pidana Islam

Menurut Abdul Qadir Audah seperti yang dikutip oleh Ahmad Wardi Muslich yang menyebutkan unsur-unsur *jarimah* ada tiga, sebagai berikut, Unsur Formal

(الركن الادبي), Unsur Materiil (الركن المادي), (الركن الشرعي).

Sedangkan unsur- unsur penggelapan dalam hukum Islam adalah sebagai berikut :

- a. Perbuatan memakan harta secara bathil dengan berkhianat dan melanggar hukum Allah
- b. Perbuatan mengambil harta tidak dengan diam-diam.
- c. Barang yang digelapkan adalah milik orang lain.

<sup>45</sup> Nurul Irfan, Masyrofah, *Fiqh Jinayah*,... 190-192

### 3. Dasar Hukum Larangan Penggelapan

Al-Qur'an sebagai kitab suci umat islam, sangat menentang dan mengutuk bahkan mengharamkan tindak pidana penggelapan. Walaupun al-Qur'an tidak menyebutkan secara tegas bentuk dan hukuman penggelapan, Islam sangat menentang bentuk-bentuk perbuatan mengambil harta orang lain dengan cara tidak benar, serta segala sesuatu yang merugikan orang banyak. Diantara ayat-ayat al-Qur'an yang mencegah, melarang perbuatan-perbuatan tersebut, yakni :

QS. Al-Baqarah : 188

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَآ إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

“dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui.”

Ditegaskan dalam QS. An-Nisa ayat 30

وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ عُدُوًّا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا ﴿٣٠﴾

“dan Barangsiapa berbuat demikian dengan melanggar hak dan aniaya, Maka Kami kelak akan memasukkannya ke dalam neraka. yang demikian itu adalah mudah bagi Allah.”

Dasar hukum lainnya juga terdapat dalam QS. Al-Maidah ayat 1:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۚ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَيْمَةٌ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ  
غَيْرِ مُحْلَىٰ الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۚ إِنَّ اللَّهَ تَحَكُّمٌ مَا يُرِيدُ ﴿٥٨﴾

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad<sup>46</sup> itu Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.”

Pada penggelapan harta terdapat dalil khusus, yang terdapat dalam Surat Al-Anfal ayat 58 :

وَأَمَّا خَوَافٌ ۖ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةٌ فَانْزِلْ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ ﴿٥٩﴾

“dan jika kamu khawatir akan (terjadinya) pengkhianatan dari suatu golongan, Maka kembalilah Perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berkhianat.”

Dengan demikian beberapa dalil yang dapat dijadikan sebagai dasar hukuman bagi pelaku tindak penggelapan dalam hukum Islam. Selain dari ayat-ayat al-Qur'an, selanjutnya juga terdapat hadis-hadis yang mengatur larangan terjadinya penggelapan :

a. Hadis dari Jabir

عن جابر عن النبي ص م قال: ليس على خائن ولا منتهب ولا مختلس قطع  
(روه الخمسه وصححه الترمذی)

<sup>46</sup> Qad (perjanjian) mencakup: janji prasetia hamba kepada Allah dan Perjanjian yang dibuat oleh manusia dalam pergaulan sesamanya.

”Tidak ada hukum potong tangan pada *khaain* (pengkhianat) *muntahib* (penyerobot), dan *mukhtalis* (menggelapkan barang)”.(H.R. Ahmad, Abu Daud, An-Nasa-y, At-Turmudzy dan Ibumajah; al- Muntaqa II:723 ).

b. Hadis Aisyah

وعن عائسة قال لت : كانت امرأة محز و مية تسعير المتاع وتحدده فامرا لني ص م  
 بقطع يدها فا تراهلها اسامة بن زيد فكلموه فكلم النبي ص م فيها فقال له النبي ص م:  
 يا اسامة لا اراك تسفع في حد من حدود الله عز و جل ثم قام النبي ص م فقال: انما ملك  
 من كان قبلكم با نه اذا سرق فيهم الشريف تركوه واذا سرق فيهم الضعيف قطعوه والذي  
 نفسي بيده لو كانت فاطمه بنت محمد لقطعت يدها فقطع يد المحز مية روه احمد  
 مسلم ونساي)

“Dari Aisyah, ia berkata Seorang perempuan Makhzumiyah pernah meminjam sebuah barang lalu dia mengingkarnya, maka oleh Nabi Saw diperintahkan supaya perempuan dipotong tangannya. Lalu keluarganya menemui Usamah ibn Zaid supaya membelanya. Kemudian ia pun berbicara dengan Nabi Saw tentang kasus perempuan tersebut. Jawab Nabi Saw kepada Usamah, “Hai Usamah, aku tidak memandangmu bias memberikan pertolongan tentang masalah had (hukuman) dari hukuman-hukuman Allah. Kemudian Nabi Saw berdiri menyampaikan pesanya, seraya bersabda, “Sesungguhnya umat sebelum kamu dulu itu pernah hancur, lantaran apabila dikalangan mereka itu ada seseorang terhormat yang mencuri, mereka membiarkannya, tetapi kalau kebetulan yang mencuri itu dari kalangan orang yang lemah, maka mereka potong tangannya. Demi Allah yang diriku dalam kekuasaanya, sungguh jika Fatimah binti Muhammad yang mencuri, pasti akan aku potong tanganya”. Begitulah, lalu Nabi Saw memotong tangan Makhzumiyah itu. (HR. Ahmad, Muslim, dan Nasai).”<sup>47</sup>

<sup>47</sup> Faishol, *Nailul Uthar VI*, (Surabaya : PT Bina Ilmu, 1986). 61-62.

## 1. Definisi Penggelapan

Penggelapan secara umum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 372 diartikan sebagai berikut :

Penggelapan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 372-377. Juga bisa diartikan penggelapan adalah seseorang yang tanpa disetujui oleh pemilik harta, mengalihkan harta tersebut kepada dirinya

<sup>49</sup> R. Soesilo, *Pasal 372 KUHP*, (Bogor: Politeia, 1991)





Penggelapan merupakan suatu kejahatan yang hampir mirip dengan pencurian dalam pasal 362 KUHP, bedanya ialah bahwa pada pencurian barang yang dimiliki itu masih belum berada dalam tangan pencuri dan masih harus diambilnya, sedang pada penggelapan waktu memilikinya barang itu sudah ada di tangan pembuat tidak dengan jalan kejahatan.

Penggelapan dalam KUHP dibagi menjadi empat macam, diantaranya :

- a. Penggelapan biasa yaitu penggelapan yang dilakukan oleh orang-orang biasa (bukan pegawai negeri). Penggelapan ini tercantum pada pasal 372 KUHP.
- b. Penggelapan ringan yaitu penggelapan biasa (pasal 372 KUHP) jika barang yang digelapkan itu bukan dan barang yang harganya tidak lebih dari Rp.250,-. Penggelapan ini dimuat pada pasal 373 KUHP.
- c. Penggelapan dengan pemberatan (pasal 374 KUHP) yaitu suatu penggelapan yang dilakukan karena :
  - 1) Terdakwa disertai menyimpan barang yang digelapkan itu karena hubungan kerja (*personlijke dienstbetrekking*), misalnya hubungan majikan dan pembantu rumah tangga.
  - 2) Terdakwa menyimpan barang itu karena jabatannya tetapi bukan pegawai negeri, misalnya tukang masak menggelapkan alat masaknya.
  - 3) Karena mendapat upah uang (ukan upah yang berupa barang lain), misalnya pekerja stasiun membawakan barang orang lain dengan mendapatkan upah, barang itu lalu digelapkan.
- d. Penggelapan berat yaitu penggelapan yang dilakukan oleh orang karena terpaksa disuruh menyimpan barang itu, (misalnya ada bencana alam gempa bumi, orang terpaksa menitipkan barang-barangnya kepada orang lain kemudian orang yang menyimpannya

Apabila yang melakukan penggelapan adalah pegawai negeri, maka sebelum menggunakan pasal-pasal tentang penggelapan (372, 373, 374, dan 375 kitab Undang-Undang Hukum Pidana) tersebut diatas harus meninjau dahulu pasal penggelapan yang di khususkan bagi pegawai negeri, oleh karena itu bagi mereka dikenakan ancaman khusus yaitu terdapat dalam pasal 415 dan 417 KUHP yang mengancam bagi negeri yang melakukan:

- a. Menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya (pasal 415 KUHP), misalnya seorang bendahara negara menggelapkan uang negara.
- b. Menggelapkan barang-barang bukti atau keterangan-keterangan yang dipakai untuk kekuasaan yang berhak, atau surat akta, surat keterangan atau daftar yang disimpan karena jabatannya (pasal 417 KUHP), misalnya seorang jaksa menggelapkan barang-barang perhiasan bukti suatu perkara yang disimpan karena jabatannya.

Berdasarkan hal tersebut, Majelis hakim harus memiliki kecermatan, ketelitian, dan kebijaksanaan-kebijaksanaan memahami akan setiap hal yang



### A. Gambaran Umum Pengadilan Negeri Purworejo

**B. Deskripsi Kasus tentang Penggelapan Sepeda Motor kredit Nomor 15/Pid.Sus/2015/PN.Pwr Putusan Pengadilan Negeri Purworejo**

Bahwa terdakwa Rio Chandra Bin Nurani Bramantya, pada hari  
jum'at tanggal 28 Februari 2014 atau setidaknya pada suatu waktu  
bulan Februari 2014 bertempat di PT.ADIRA FINANCE Cabang Magelang

[illegible]

Selanjutnya pada hari jum'at tanggal 28 Februari 2014 terdakwa mengajukan aplikasi kredit atas nama terdakwa dengan kepemilikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda New Vario Techno F1 Noka: MH1JFB127EK276762 Nosin: JFB1E2228873 warna hitam putih, untuk proses survei dilakukan oleh Ade Kukilo (DPO), pembiayaan kredit sepeda motor tersebut dibiayai oleh PT. ADIRA FINANCE dengan angsuran perbulan yang dikenakan kepada terdakwa Rp. 530.000,- (lima ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan jangka waktu selama 47 (empat puluh tujuh) bulan sesuai dengan Perjanjian Pembiayaan selama dalam masa angsumran kendaraan tersebut tidak boleh dipindah tangankan tanpa sepengetahuan dari

[illegible]

pihak PT.ADIRA FINANCE dan telah dibuatkan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor :W13-00192796.AH.05.01 TAHUN 2014 tertanggal 07 Maret 2014 antara terdakwa dengan pihak PT. ADIRA FINANCE.

Setelah terdakwa mendapatkan sepeda motor sekitar akhir februari 2014, terdakwa dihubungi oleh Agung (DPO) yang merupakan suruhan Hari Ompong (DPO) dan janji untuk ketemu di Desa Kalisemo Kecamatan Loano Purworejo, dan saat itu terdakwa mengoperasikan sepeda motor tersebut tanpa pemberitahuan secara resmi kepada pihak PT. ADIRA FINANCE, dan terdakwa menerima uang sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dari Agung (DPO). Kemudian sekitar bulan mei 2014 pihak PT. ADIRA FINANCE mengetahui adanya penunggakan dari aplikasi terdakwa hingga 6 (enam) bulan selanjutnya pihak PT.ADIRA FINANCE melalui saksi M.Hafid Arbanta, SE sebagai Remedial Officer melakukan pengecekan dengan datang kepada terdakwa, dan diketahui bahwa sepedanya telah dialihkan kepada orang lain tanpa sepengetahuan maupun izin dari pihak PT.ADIRA FINANCE, terdakwa berjanji akan membayar seluruh tunggakan, namun terdakwa tidak memenuhi perjanjian sampai beberapa bulan, karena merasa dirugikan dengan apa yang dilakukan oleh terdakwa PT. ADIRA FINANCE melaporkan kepada pihak kepolisian untuk diproses lebih lanjut. Akibat perbuatan terdakwa PT.ADIRA FINANCE mengalami



Perbuatan terdakwa di dakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan alternative yaitu dakwaan pertama, Perbuatan terdakwa dapat dikenakan pasal 36 Undang-Undang Fidusia Nomor 42 Tahun 1999 yakni tentang jaminan fidusia melihat bahwa sepeda motor yang dialihkan tanpa izin oleh terdakwa adalah obyek perjanjian jaminan fidusia, yang berbunyi

Selanjutnya dakwaan kedua, perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP yang berbunyi

Dengan dakwaan yang diberikan kepada terdakwa, dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang berupa 1 (satu) lembar Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W13.00192796.AH.05.01 tahun 2014

<sup>56</sup> Pemberi Fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan jaminan fidusia

<sup>57</sup> Undang – Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

<sup>58</sup> R. Soesilo, *Kitab undang-undang Hukum Pidana (KUHP)*, (Bogor: Politeia 1991). 259

Setelah mendengar dakwaan, terdakwa melakukan pembelaan/pledoi atau permohonan lisan dari terdakwa yang pada pokoknya terdakwa mengakui perbuatannya menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa terdakwa mengakui perbuatannya menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Setelah mendengar pembelaan yang dilakukan secara lisan oleh terdakwa Penuntut Umum juga menghadirkan beberapa saksi untuk mendengarkan keterangan dalam persidangan untuk menguatkan dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut<sup>59</sup> :

Bahwa saksi adalah AR Head 34 yang menangani keterlambatan angsuran wilayah Purworejo PT. ADIRA FINANCE. Saksi mengetahui bahwa pada bulan mei 2014 terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda New Vario Techno melalui kredit di PT. ADIRA

[illegible]

FINANCE RO Purworejo tetapi pembayaran angsuran tidak lancar, terdakwa terlambat membayar angsuran kredit selama 2 (dua) bulan dimana terdakwa hanya membayar angsuran sekali pada bulan maret 2014 yaitu termasuk yang muka dan angsuran pertama dan oleh karena itu proses collection berjalan. Kemudian pihak PT. ADIRA FINANCE meminta terdakwa untuk menghadirkan sepeda motor, namun terdakwa tidak sanggup menghidarkannya dengan alasan sepeda motor tersebut sudah dialihkan penguasaanya kepada orang lain.

Setelah dilakukan penagihan berulang kali, terdakwa mengakui bahwa namanya dipinjam oleh Adira oleh Ade Kulilo (DPO) selaku Karyawan Adira sebagai debitur untuk mengajukan kredit, unit sepeda motornya itu setelah dikirim ke terdakwa kemudian diserahkan lagi pada orang lain dan terdakwa atas perbuatannya itu diberi uang sebesar Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah).

Saksi mengatakan bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda New Vario Techno telah diambil atas nama terdakwa dengan cara kredit melalui Adira dengan dibebani Fidusia, sebagaimana tertuang dalam Akta Jaminan Fidusia Nomor: 338 tanggal 05 Maret 2014 yang dibuat oleh Notaris Retno Agustianingsih, SH., M.Kn dan telah didaftarkan oleh PT. Adira Dinamika Multi Finance, Tbk Cabang Magelang dengan

Saksi mengetahui hal itu setelah diberitahu saksi M. Hafid Arbanta, SE yaitu Karyawan Adira bagian Penagihan (Remedial Officer), dan hingga sekarang unit sepeda motor itu sebagai obyek jaminan fidusia tidak ketemu, Ade Kukilo (DPO) dahulu adalah anak buah dari saksi, saksi mengatakan atas perbuatan terdakwa, maka Adira mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.14.500.000,00 (empat belas juta rupiah), saksi mengenali barang bukti di persidangan, dan terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi.

Saksi adalah karyawan PT.Adira Finance (Adira) sebagai Remedial Officer, pada bulan Mei 2014 terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda New Vario Techno melalui kredit di PT. Adira Finance RO Purworejo (Adira) tetapi pembayaran angsurannya tidak Lancar, terdakwa terlambat membayar angsuran kredit selama 2 (dua) bulan di mana terdakwa hanya membayar angsuran sekali pada bulan Maret 2014 yaitu termasuk uang muka dan angsuran pertama dan oleh karena itu proses collection berjalan, kemudian Adira meminta terdakwa menghadirkan unit sepeda motornya, tetapi terdakwa tidak sanggup menghidirkannya dengan alasan sepeda motor tersebut sudah

Saksi mengatakan bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda New Vario Techno FI Tipe Scootermatic, No Ka : MH1JFB127EK276762, No Sin : JFB1E2228873 telah diambil atas nama terdakwa dengan cara kredit melalui Adira dengan dibebani Fidusia, sebagaimana tertuang dalam Akta Jaminan Fidusia Nomor : 338 tanggal 05 Maret 2014 yang dibuat oleh Notaris Retno Agustianingsih,SH.,M.Kn dan telah didaftarkan oleh PT. Adira Dinamika Multi Finance, Tbk Cabang Magelang dengan Kantor Cabang Pembantu Purworejo dengan Nomor : W.13.00192796.05.01 tahun 2014 tanggal 07 Maret 2014, saksi kemudian melaporkan kejadian ini kepada Adira, saksi mengenali barang bukti di

persidangan, saksi mengenali barang bukti di persidangan, dan terdakwa membenarkan yang diterangkan oleh saksi.

Saksi adalah seorang Notaris di Kabupaten Magelang, saksi pernah membuat Akta Jaminan Fidusia Nomor : 338 tanggal 05 Maret 2014 yang isinya tentang pendaftaran jaminan fidusia dengan perjanjian pokok kredit atas nama terdakwa dengan PT. Adira Dinamika Multi Finance, Tbk yang dikuasakan oleh Tuan Gatot Teguh Arifianto, dalam pembuatan akta tersebut Tuan Gatot Teguh Arifianto datang sendiri menghadap saksi tanggal 05 Maret 2014, akta jaminan fidusia itu telah didaftarkan di Kemenkumham sehingga keluarlah Jaminan Fidusia Nomor : W13.00192796.AH.05.01 tahun 2014 tanggal 07 Maret 2014.

Saksi adalah teman bermain dari terdakwa, saksi mengetahui jika pada bulan Maret 2014 terdakwa memiliki sebuah sepeda motor Honda Vario masih baru dan belum ada plat nomornya. Setelah bertemu, terdakwa menceritakan pada saksi jika sepeda motornya itu baru dibeli dengan cara kredit dan hanya digunakan atas nama saja dengan mendapat imbalan sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), saksi menjelaskan pada suatu hari di bulan Maret 2014 kurang lebih pukul 13.00 WIB saksi disuruh terdakwa membawakan sepeda motor Honda Vario itu ke daerah Sejiwan Loano untuk diserahkan kepada pemesan, oleh karena terdakwa hanya dipinjam namanya saja dan saat itu terdakwa mengikuti saksi dengan menggunakan mobil, tempatnya di sebelah utara Pasar Sejiwan Loano sudah ditunggu 2 (dua) orang laki-laki, dan terdakwa berunding dengan mereka sementara itu saksi di dalam mobil, kemudian sepeda motor itu diturunkan dan dibawa pergi salah satu laki-laki itu ke arah Purworejo, saksi mengenali barang bukti di persidangan, dan terdakwa tidak keberatan dan membenarkan atas keterangan saksi.



### C. Keterangan Terdakwa

Terdakwa bernama Rio Chandra bin Nurani Bramantya, terdakwa telah mengalihkan barang berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda New Vario Techno FI Tipe Scootermatic, No Ka : MH1JFB127EK276762, No Sin : JFB1E2228873 pada orang lain tanpa seizin dan sepengetahuan dari PT. Adira Finance (Adira), awalnya pada bulan Februari 2014, terdakwa yang sedang di rumah didatangi Hari Ompong (DPO) dengan tujuan meminta tolong terdakwa agar dipinjam namanya untuk ambil sepeda motor Honda New Vario dengan cara kredit dan Hari Ompong (DPO) menjanjikan imbalan sebesar Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah).

Kemudian Hari Ompong (DPO) yang menyiapkan persyaratannya dan yang membayar uang muka serta angsuran pertamanya, 2 (dua) hari kemudian Pihak Adira datang yakni Ade Kukilo (DPO) ke rumah terdakwa untuk mensurvei, dan terdakwa hanya menandatangani dokumen-dokumen pengajuan kredit yang diberikan Ade Kukilo (DPO) dan terdakwa sama sekali tidak datang ke dealer Honda berkaitan pengajuan kredit tersebut, kemudian sekitar bulan Februari 2014 sekitar pukul 14.00 WIB menerima sepeda motor Honda New Vario Techno tersebut, dan kemudian terdakwa ditelepon Agung (DPO) yang tinggal di alamat Butuh, Purworejo yang mengaku suruhan dari Hari Ompong (DPO) yang beralamat di Kutoarjo, Purworejo untuk mengambil sepeda motor tersebut, kemudian terdakwa

Ternyata kredit sepeda motor itu macet pembayarannya, sehingga terdakwa didatangi pegawai Adira, dan terdakwa menjelaskan jika dirinya hanya dipinjam nama oleh Hari Ompong (DPO) untuk membeli sepeda motor tersebut melalui kredit oleh Adira, terdakwa tidak mengetahui tentang jaminan fidusia terkait pembelian sepeda motor tersebut, terdakwa sehari-hari kerja di Barata pencucian mobil dan terdakwa digaji sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), terdakwa sebelumnya memang berteman dengan Hari Ompong (DPO), Agung (DPO), terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa membenarkan barang bukti di persidangan.<sup>60</sup>

Dalam proses persidangan Majelis Hakim dalam memutuskan perkara adalah dengan menggunakan landasan-landasan hukum yakni dengan berlandaskan dakwaan-dakwaan yang diberikan oleh Penuntut Umum, dalam perkara ini, Penuntut Umum memberikan dakwaan alternative, yakni :

[illegible]



tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti yang sah menurut hukum di Persidangan dan mendukung proses pembuktian perkara ini. Untuk mempersingkat uraian, maka keterangan-keterangan para saksi dan terdakwa serta semua yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap secara lengkap menjadi satu kesatuan dalam putusan ini bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan, berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa serta dikaitkan dengan adanya barang bukti yang diajukan didepan persidangan. maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai bahwa benar terdakwa telah mengajukan kredit 1(satu) unit sepeda motor ke dealer PT.ADIRA FINANCE dengan sistem kredit, namun proses pengangsuran macet dibulan ke dua dan ke tiga dan selanjutnya, terdakwa tidak menerangkan yang sebenarnya dan tidak meminta izin ke pihak PT.ADIRA FINANCE bahwa sepeda motornya dialihkan ke orang lain. Akibat perbuatan terdakwa PT. ADIRA FINANCE mengalami kerugian sebesar 24.909.994,- (dua puluh empat juta sembilan ratus sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh empat). Dan terdakwa mengakuinya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. dimintai tolong oleh Hari Ompong (DPO) untuk mengajukan kredit atas nama terdakwa dengan dijanjikan diebri imbalan uang sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).

Bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka memberikan keleluasan Majelis Hakim untuk memilih salah satu dakwaan yang mendekati fakta hukum yang terungkap di Persidangan serta menimbang, bahwa sesuai fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP yang unsur- unurnya adalah sebagai berikut:

- [illegible]

dapat dipertanggungjawabkan dimuka hukum, sehingga demikian unsur “barang siapa” ini telah terbukti;

2. “dengan sengaja dan melawan hukum” berdasarkan barang bukti dan keterangan-keterangan saksi maupun terdakwa yang telah diajukan di persidangan, telah terbukti bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut jelas bahwa perbuatan terdakwa yang mau namanya dipinjam oleh Hari Ompong (DPO) untuk kredit sepeda motor Honda New Vario dengan janji imbalan uang sebesar Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), yang kemudian terdakwa diserahkan kepada Agung (DPO) yang mengaku suruhan Hari Ompong (DPO) tanpa izin dan sepengetahuan PT.ADIRA FINANCE dan merugikan sepengetahuan PT.ADIRA FINANCE. Dengan demikian atas perbuatan terdakwa telah terbukti bahwa ditemukan adanya niat dan sikap bathin dalam diri terdakwa dengan maksud agar terdakwa dapat memperoleh imbalan uang dan menikmati uang tersebut untuk keperluan sehari-hari, dan atas perbuatan terdakwa yang telah diterangkan yang telah mengalihkan sepeda motor tanpa izin dan sepengetahuan dari pihak PT. ADIRA FINANCE maka jelas hal itu selain bertentangan dengan Undang-Undang juga melanggar kaidah hukum yang tidak tertulis seperti agama, kesusilaan, kepatutan dan lain sebagainya. Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur kedua pasal tersebut terpenuhi.

[illegible]



hasil kejahatan karena terdakwa menggunakan persyaratan dan telah mendatangi dokumen-dokumen pengajuan kredit ke Adira dan telah disetujui hingga akhirnya sepeda motor diserahkan dari dealer ke terdakwa. Mengenai janji imbalan uang dari hari Ompong (DPO) juga berdasarkan fakta hukum belum dibayarkan diserahkan sepeda motor itu dari dealer ke terdakwa dan baru dibayarkan imbalan tersebut setelah terdakwa menyerahkan sepeda motor itu kepada Agung (DPO) di pasar Sejiwan. Dengan demikian maka unsur yang ketiga pasal ini telah terpenuhi.

Sehingga demikian dakwaan kedua dari Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi unsur-unsurnya dan telah terbukti, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis hakim berpendirian dan berpendapat, bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, terdakwa bersalah melakukan tindak pidana dakwaan kedua yakni melanggar pasal 372 KUHP tentang Penggelapan, oleh karena dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka dakwaan Jaksa Penuntut Umum selebihnya atau dakwaan yang pertama tidak perlu dibuktikan dan dipertimbangkan lagi lebih lanjut. Karena selama pemeriksaan di persidangan Majelis hakim tidak menemukan adanya faktor yang menghapuskan kesalahan terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang

[illegible]

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
2. Perbuatan terdakwa merugikan PT. ADIRA FINANCE;

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berlaku sopan dipersidangan dan mengaku secara terus terang menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
2. Terdakwa belum pernah dihukum.

**F. Amar Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2015/Pn.Pwr tentang Tindak Pidana Penggelapan Pengadilan Negeri Purworejo**

1. Menyatakan terdakwa Rio Chandra bin Nurani Bramantya telah terbukti secara sah dan menyatakan bersalah melakukan tindak pidana “penggelapan”;
2. Menyatukan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang diajtuhkan;
4. Menetapkan terdakwa terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - a. 1 (satu) lembar Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W13.00192796.AH.05.01 tahun 2014 tanggal 07 Maret 2014;
  - b. 1 (satu) bundel Akta Jaminan Fidusia Nomor: 338 tanggal 05 Maret 2014;  
Dikembalikan kepada pihak PT.ADIRA FINANCE;
  - c. 1 (satu) buah Surat Pernyataan atas nama Rio Candra.  
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.00,- (dua ribu rupiah).

**G. Isi Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2015/Pn.Pwr tentang Tindak Pidana Penggelapan Pengadilan Negeri Purworejo**

Dengan mempertimbangkan hal-hal yang telah disebutkan diatas menurut Majelis hakim pidana yang dijatuhkan pada diri terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini sudah sesuai dengan kadar kesalahan dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat mengingat pasal 374 KUHP, Undang – Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP serta pasal-pasal lain dalam peraturan hukum yang bersangkutan. Dengan berbagai pertimbangan hukum hakim diatas, maka hakim memutus perkara

## MENGADILI

- [illegible]

**NEGERI PURWOREJO NOMOR 15/PID.SUS/2015/PN.PW**  
**TANG TINDAK PIDANA PENGGELAPAN SEPEDA MO**  
**KREDIT**

**alisis Pertimbangan Hukum Hakim pada Putusan Pengadilan**  
**worejo Nomor 15/Pid.Sus/2015/PN.Pwr**

Tindak pidana penggelapan merupakan suatu tindak pidana yang dianggap sama dengan tindak pidana pencurian yang diatur dalam pasal 368 KUHP. Namun, terdapat perbedaan yakni pada tindak pidana pencurian yang dimiliki itu belum berada dalam kekuasaan atau ditangan pencuri. Hal ini harus “diambilnya” terlebih dahulu, sedangkan dalam tindak

Tindak pidana penggelapan merupakan suatu tindak pidana yang dianggap sama dengan tindak pidana pencurian yang diatur dalam pasal 362 KUHP. Namun, terdapat perbedaan yakni pada tindak pidana pencurian barang yang dimiliki itu belum berada dalam kekuasaan atau ditangan pencuri dan masih harus “diambilnya” terlebih dahulu, sedangkan dalam tindak pidana penggelapan ketika waktu dimilikinya barang, kondisi barang sudah ada di tangan pelaku atau si pelaku pembuat namun tidak dengan cara atau jalan kejahatan.

Adapun fakta hukum yang terungkap dalam persidangan yang menjadi dasar dari pertimbangan hakim dalam memutus adalah sebagai berikut:

- un fakta hukum yang terungkap dalam persidangan pertimbangan hakim dalam memutus adalah sebagai "Siapa" bahwa yang dimaksud "barang siapa" adalah subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang terdakwa, karena terdakwa melakukan suatu perbuatan pidana sesuai dengan surat dakwaan dari aksa penuntut umum ke persidangan adalah terdakwa Rio Chandra bin L. membenarkan identitas tersebut, demikian pula terdakwa yang setiap perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan sehingga demikian unsur "barang siapa" ini telah terpenuhi. "Sengaja dan melawan hukum" berdasarkan keterangan saksi maupun terdakwa yang terdakwa



kepatutan dan lain sebagainya. Menimbang, bahwa unsur kedua pasal tersebut terpenuhi.

“mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang bukan karena kejahatan” berdasarkan fakta-fakta bahwa barang bukti dan keterangan saksi-saksi yang telah di

- Umum dalam persidangan untuk menguatkan  
didakwakan kepada terdakwa, menimbang bahwa ap  
dapat dikatakan perbuatan mengaku sebagai milik  
yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain,  
sebagai berikut. Menimbang, bahwa berdasarkan  
terdakwa dengan mendatangkan dokumen-dokumen  
motor Honda New Vario Techno yang diajukan  
namnya hingga terdakwa menerima sepeda mot

menerangkan kepada PT.ADIRA FINANCE atas keadaan atau kondisi yang sebenarnya, sehinggalah perbuatan terdakwa termasuk dalam kategori mengaku sebagai pemilik atau pembeli dari sepeda motor Honda New Vario Techno tersebut.

Selanjutnya untuk mempertimbangkan apakah sepeda motor tersebut dalam kekuasaan terdakwa merupakan hasil kejahatan atau bukan akan dipertimbangkan sebagai berikut: menimbang, bahwa sepeda motor Honda New Vario Techno dalam kekuasaan terdakwa bukanlah hasil kejahatan karena terdakwa menggunakan persyaratan dan telah mendatangkan dokumen-dokumen pengajuan kredit ke Adira dan telah disetujui hingga akhirnya sepeda motor diserahkan dari dealer ke terdakwa. Mengenai janji imbalan uang dari hari Ompong (DPO) juga berdasarkan fakta hukum belum dibayarkan diserahkan sepeda motor itu dari dealer ke terdakwa dan baru dibayarkan imbalan tersebut setelah terdakwa menyerahkan sepeda motor itu kepada Agung (DPO) di pasar Sejiwan. Dengan demikian maka unsur yang ketiga pasal ini telah terpenuhi.

Dengan demikian dakwaan kedua dari Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi unsur-unsurnya dan telah terbukti, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis hakim berpendirian dan berpendapat, bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, terdakwa bersalah melakukan tindak pidana dakwaan kedua yakni melanggar pasal 372

KUHP tentang Penggelapan, oleh karena dakwaan kedua jaksa penuntut umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka dakwaan Jaksa Penuntut Umum selebihnya atau dakwaan yang pertama tidak perlu dibuktikan dan dipertimbangkan lagi lebih lanjut. Karena selama pemeriksaan di persidangan majelis hakim tidak menemukan adanya faktor yang menghapus kesalahan terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembeda atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan terdakwa, maka terdakwa dianggap sebagai subjek hukum yang mampu bertanggungjawab sehingga terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya atau terdakwa harus dijatuhi pidana, serta karena terdakwa dalam hal ini ditahan, maka berdasarkan pasal 33 KUHP, majelis hakim berpendapat, bahwa lamanya terdakwa ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa menjalani hukum, majelis hakim menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan. Serta menimbang bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam persidangan, akan ditentukan statusnya dalam amar putusan bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 KUHP, kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan.

Hal-hal yang memberatkan :

- Hal-hal yang meringankan :

- Dalam unsur yang meringankan di atas merupakan salah satu pertimbangan peringanan pidana yang dijatuhkan oleh Hakim dalam memutus perkara. Pertimbangan ini merupakan pertimbangan subjektif Hakim yang berimplikasi bahwa Hakim bebas menentukan hal-hal yang

Dalam proses persidangan majelis hakim mempunyai kewenangan untuk memeriksa unsur-unsur yang timbul di persidangan. Dengan kata lain Hakim harus bersifat aktif dan teliti dalam melihat fakta hukum yang muncul dalam persidangan meskipun unsur tersebut tidak dijadikan oleh jaksa penuntut umum sebagai pertimbangannya untuk mengajukan suatu tuntutan, sehingga putusan yang dikeluarkan oleh majelis hakim tidak bertentangan dengan keadilan masyarakat mengingat pasal 372 KUHP, yang tertuang dalam amar putusan perkara nomor 15/Pid.Sus/2015/Pn.Pwr tentang penggelapan sepeda motor kredit dengan menyatakan sebagai berikut:

- [illegible]

[illegible]

Namun, dalam putusan tersebut berdasarkan barang bukti dengan adanya 1 (satu) lembar Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W13.00192796.AH.05.01 tahun 2014 tanggal 07 Maret 2014, 1 (satu) bundel Akta Jaminan Fidusia Nomor: 338 tanggal 05 Maret 2014, 1 (satu) buah Surat Pernyataan atas nama Rio Candra dan diperkuat dengan keterangan saksi oleh notaris dan pegawai dealer PT. ADIRA FINANCE yang telah dihadirkan dipersidangan maupun keterangan terdakwa, dalam hukum acara pidana, Hakim juga dapat menggunakan undang-undang tentang jaminan fidusia berdasarkan dengan adanya asas *lex specialis derogat lex generalis* yang diatur dalam pasal 63 ayat (2) KUHP tentang pembarengan tindak pidana yang berbunyi:

Dalam kasus ini adalah tindak pidana penggelapan dengan unsur mengalihkan tanpa izin pihak *leasing* (lembaga pembiayaan) dan yang telah dialihkan adalah sepeda motor kredit juga menjadi obyek jaminan fidusia, kita tidak bisa mengatakan bahwa perjanjian utang piutang dan perjanjian kredit lebih penting dibandingkan dengan perjanjian jaminannya, karena pada kenyataannya justru perjanjian jaminan memegang peranan yang menentukan



dalam timbulnya perjanjian utang piutang bahkan dalam praktiknya kesepakatan mengenai objek jaminan selalu muncul lebih dulu sebelum persoalan utang piutangnya disepakati, sehingga seakan-akan yang terjadi saat ini adalah perjanjian jaminanlah yang menentukan lahir atau tidkanya perjanjian utang piutang karena tidak aka nada kreditor yang mau untuk memberikan utang (kredit) kepada debitor yang tidak memiliki jaminan memadai.

Dengan demikian, maka muncul Fidusia yang dilatarbelakangi oleh keberadaan Undang-Undang (KUH Perdata) yang mengatur tentang gadai dimana praktiknya menimbulkan banyak kesulitan dan tidak memiliki segi kepraktisan dalam pelaksanaannya, hal ini diakibatkan oleh barang yang menjadi objek jaminan harus diserahkan kepada pihak kreditor, sehingga jika barang-barang tersebut berkaitan dengan sarana penghidupan misalnya kendaraan yang sarana dalam mencari nafkah, maka syarat penyerahan objek jaminan secara nyata kepada pihak kreditor menimbulkan hambatan besar bagi pihak debitur. Maka, lembaga fidusia yang bisa memberikan jaminan kepada pihak kreditor tanpa perlu menyerahkan penguasaan barang jaminan itu kepada pihak kreditor menjadi alternative yang cukup membantu bagi masyarakat terutama kalangan masyarakat mengenai kebawah. Pemilik barang tetap dapat menguasai dan mempergunakan barangnya namun ia

diwajibkan untuk menyerahkan hak kepemilikan atas barang itu secara *constitutum possessorium* kepada pihak kreditor.

1. “unsur pemberi fidusia” dalam hal ini yang menjadi pemberi fidusia adalah terdakwa yang bernama Rio Chandra bin Nurani Bramantya dan juga sebagai debitur, dibuktikan dengan adanya 1 (satu) lembar Sertifikat jaminan Fidusia Nomor: W13.00192796.AH.05.01 tahun 2014 tanggal 07 Maret 2014; 1 (satu) bundel Akta Jaminan Fidusia Nomor: 338 tanggal 05 Maret 2014; 1 (satu) buah Surat Pernyataan atas nama Rio Chandra.
2. “unsur mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan” dalam hal ini berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi maupun terdakwa Rio Chandra bin Nurani Bramantya telah mengalihkan sepeda motor Honda New Vario Techno F1 Noka: MH1JFB127EK276762 Nosin: JFB1E2228873 tanpa izin dari pihak PT.ADIRA FINANCE kepada Hari Ompong (DPO) dengan imbalan diberi uang Rp. 1.200.000,- (satu juta

[illegible]

“hak tanggungan tetap mengikuti objeknya dalam tangan siapapun objek tersebut berada”

“jaminan fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam tangan siapapun benda tersebut berada kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi objek jaminan fidusia”

Maka ketika terdapat peralihan tanpa adanya persetujuan dari pemegang jaminan fidusia merupakan suatu tindak pidana, dan diatur dalam pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia. Seperti halnya kasus yang ada dalam putusan Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 15/Pid.Sus/2015/PN.Pwr tentang penggelapan sepeda motor kredit

Secara yuridis formil, dalam mempertimbangkan putusan Hakim dapat memilih dakwaan pasal 372 KUHP tentang penggelapan ketika niat terdakwa untuk mengalihkan objek jaminan fidusia kepada pihak ketiga yakni Hari Ompong (DPO) setelah akad kredit terjadi, bukan sebelum ditanda tangani akad kredit, karena niat batin (*mens rea*) menjadi kunci

[illegible]

injauan Hukum Pidana Islam terhadap Pertimbangan Hukum Tindak Pidana Penggelapan Sepeda Motor Kredit dalam Peraturan Menteri Purworejo Nomor 15/Pid.Sus/2015/PN.Pwr.

Selanjutnya akan menganalisis tindak pidana penggelapan kredit dalam hukum pidana Islam, dalam hukum pidana Islam apakah dianggap tindak pidana, apabila unsur-unsurnya telah terdapat dua yakni unsur umum dan unsur khusus. Menurut Aswadi seperti yang dikutip Ahmad Wardi Muslich mengemukakan bahwa unsur untuk *jarimah* ada tiga macamnya seperti halnya yang

Selanjutnya akan menganalisis tindak pidana penggelapan dalam hukum pidana Islam, dalam hukum pidana Islam yang dianggap tindak pidana, apabila unsur-unsurnya telah terdapat dua yakni unsur umum dan unsur khusus. Menurut Asyari yang dikutip Ahmad Wardi Muslich mengemukakan bahwa unsur untuk *jarimah* ada tiga macamnya seperti halnya yang

num untuk *jarimah* ada tiga macamnya seperti halnya yang

1. Adanya *naş* atau ketentuan yang melarang perbuatan dengan hukuman.

dilakukan dengan cara melakukan pengajuan kredit 1 (satu) motor Honda New Vario Techno F1 Noka: MH1JFB127EK27JFB1E2228873 warna hitam putih, dan dilakukan survey oleh (DPO) dan pembiayaan kredit kepemilikan sepeda motor tersebut oleh PT.ADIRA FINANCE dengan angsuran perbulan Rp.530.000 (ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan jangka waktu 47 (empat puluh tujuh) bulan. Berdasarkan surat perjanjian pembiayaan nomor: 04/2014 tertanggal 28 Februari 2014 disebutkan bahwa dalam masa

Karena terdakwa telah mengalihkan sepeda motor kepada hari Ompong (DPO) tanpa izin atau sepengetahuan pihak pembiayaan PT. ADIRA FINANCE maka terdakwa telah memiliki barang tersebut melawan hukum atau memiliki harta orang lain secara tidak benar dan merugikan orang lain. Islam sangat menentang bentuk-bentuk perbuatan memiliki harta lain dengan cara tidak benar, serta segala sesuatu yang merugikan orang banyak. Di antara ayat-ayat al-Qur'an yang mencegah dan melarang perbuatan-perbuatan tersebut adalah:

- [illegible]



وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخُلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ

أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

“dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui.”<sup>62</sup>

b. Qs. an-Nisa': 29

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً

عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu;<sup>63</sup> Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”<sup>64</sup>

Selanjutnya ditegaskan dalam surat an- Nisa ayat 30 :

وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا ۖ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا ﴿٥٠﴾

“dan Barangsiapa berbuat demikian dengan melanggar hak dan aniaya, Maka Kami kelak akan memasukkannya ke dalam neraka. yang demikian itu adalah mudah bagi Allah.”<sup>65</sup>

<sup>62</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: CV. Toha Putra, 1989), 46

<sup>63</sup> Larangan membunuh diri sendiri mencakup juga larangan membunuh orang lain, sebab membunuh orang lain berarti membunuh diri sendiri, karena umat merupakan suatu kesatuan.

<sup>64</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, 122

<sup>65</sup> Ibid.,

, diantara perbuatan tersebut adalah perbuatan  
di kekuasaan Pengadilan Negeri Purworejo dengan  
Sus/2015/PN.Pwr. terdakwa dalam putusan ters  
bin Nurani Bramantya. Hukuman untuk seorang  
cara tidak sah dengan melanggar hak sesuai a  
*ukhrawi*. Hukuman *ukhrawi* berupa siksa neraka.  
ejahatannya. Dengan demikian Putusan Pengadilan  
5/Pid.Sus/2015/PN.Pwr telah memenuhi unsur jari  
langkah laku yang membentuk *jarīmah*, baik berup  
maupun sikap tidak berbuat (negatif).

- , diantara perbuatan tersebut adalah perbuatan  
di kekuasaan Pengadilan Negeri Purworejo dengan  
Sus/2015/PN.Pwr. terdakwa dalam putusan ters  
bin Nurani Bramantya. Hukuman untuk seorang  
cara tidak sah dengan melanggar hak sesuai a  
*ukhrawi*. Hukuman *ukhrawi* berupa siksa neraka.  
ejahatannya. Dengan demikian Putusan Pengadilan  
5/Pid.Sus/2015/PN.Pwr telah memenuhi unsur jari  
langkah laku yang membentuk *jarīmah*, baik berup  
maupun sikap tidak berbuat (negatif).

, diantara perbuatan tersebut adalah perbuatan  
di kekuasaan Pengadilan Negeri Purworejo dengan  
Sus/2015/PN.Pwr. terdakwa dalam putusan ters  
bin Nurani Bramantya. Hukuman untuk seorang  
cara tidak sah dengan melanggar hak sesuai a  
*ukhrawi*. Hukuman *ukhrawi* berupa siksa neraka.  
ejahatannya. Dengan demikian Putusan Pengadilan  
5/Pid.Sus/2015/PN.Pwr telah memenuhi unsur jari  
langkah laku yang membentuk *jarīmah*, baik berup  
maupun sikap tidak berbuat (negatif).

- , diantara perbuatan tersebut adalah perbuatan  
di kekuasaan Pengadilan Negeri Purworejo dengan  
Sus/2015/PN.Pwr. terdakwa dalam putusan ters  
bin Nurani Bramantya. Hukuman untuk seorang  
cara tidak sah dengan melanggar hak sesuai a  
*ukhrawi*. Hukuman *ukhrawi* berupa siksa neraka.  
ejahatannya. Dengan demikian Putusan Pengadilan  
5/Pid.Sus/2015/PN.Pwr telah memenuhi unsur jari  
langkah laku yang membentuk *jarīmah*, baik berup  
maupun sikap tidak berbuat (negatif).

- b. Terdakwa benar telah melakukan pengajuan kredit 1 (satu) unit Honda New Vario Techno ke dealer dan lembaga pembiyaanya adalah PT.ADIRA FINANCE.
- c. Terdakwa telah melakukan pengalihan sepda motor Honda New Vario Techno kepada Hari Ompong (DPO) melalui Agung (DPO) orang suruhan Hari Ompong (DPO) tanpa sepengetahuan dan izin dari pihak PT.ADIRA FINANCE.
- d. Terdaka tidak membayar angsuran pada bulan selanjutnya dan menunggak selama 2 (dua) bulan.

Berdasarkan keterangan terdakwa dan saksi diatas, dapat disimpulkan bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana penggelapan atau *jarimah* dan



Selain hukuman diatas menurut Dzajuli seperti yang dikutip oleh Achmad Wardi Muslich terdapat hukuman-hukuman *ta'zīr* yang lain, yaitu : peringatan keras, dihadirkan dihadapan sidang, nasihat, celaan, pengucilan, pemecatan, pengumuman kesalahan secara terbuka.<sup>67</sup> Sedangkan inti dari jarimah *ta'zīr* adalah perbuatan maksiat. Maksiat adalah meninggalkan perbuatan yang diwajibkan dan melakukan perbuatan yang diharamkan (dilarang). Para fuqaha memberikan contoh meninggalkan kewajiban yaitu mengkhianati amanah, seperti menggelapkan titipan, memanipulasi harta anak yatim, hasil waqaf, dan lain-lain. Sebagai contoh perbuatan yang dilarang, seperti sumpah palsu, penipuan dalam hal jual beli, melakukan riba, melindungi

<sup>67</sup> Ibid., 268

dan menyembunyikan pelaku kejahatan, memakan barang-barang yang diharamkan.

Terdapat hadis yang menguatkan larangan terhadap tindak pidana penggelapan dan sekaligus menjelaskan hukumanya. Yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Jabir yang berbunyi:

عن جابر عن النبص م قال : ليس على ثن ولا منتهب ومختلس قطع . (رواه الخمسة و صححه الترمذی)

(مذى)

“tidak ada hukuman potong tangan pada khain (penghianatan), muntahin (penyerobot) dan mukhtalis (menggelapkan barang)” (H.R Ahmad Daud, An-Naşa’i, At-Turmudzin dan Ibnu majah: al-Muntaqa II:273).

Dari hadis diatas, menjelaskan bahwa terhadap penghianat, penyerobot barang dan orang yang menggelapkan barang, tidak dapat dipotong tangannya. Menurut golongan Syafi’iyah, Hanafiyah dan Al itrah, seperti yang dikutip Hasbi Ash-Shidsiqy. Berpendapat bahwa terhadap mereka yang berkhianat terhadap amanah, menyerobot dan menggelapkan harta orang, tidak dapat dipotong tangan.<sup>68</sup>

Menurut Hasbi Ash-Shidsiqy, orang yang menginginkan telah meminjam suatu barang dipotong tanganya. Sedangkan menurut Ahmad dan Ishaq yang dikutip Haliman, terhadap delik penggelapan ini berlaku ketentuan hukuman had pemotongan tangan. Tetapi jumhur berpendapat,

<sup>68</sup> Achmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*,. 249.

Menurut Zufar serta ulama Khawarij, Ahluh Dhahir dan ibny Hazm seperti yang dikutip Hasbi Ash-Shidsiqy, menetapkan bahwa mereka yang mengingkari barang yang dipinjamnya dipotong tangan. Ibnu Qayyim, memasukkan orang yang mengingkari pinjaman kedalam golongan pencuri. Mereka yang menyerobot dan menggelapkan barang tidak dikategorikan sebagai pencuri. Sedangkan menurut Haliman penerimaan barang yang diberikan kepada seseorang, dan apabila kepercayaan itu dilanggar, dengan tindakan kepemilikan untuk kepentingan diri sendiri atau orang lain, maka telah terjadi *djuhudul ariyah* (mengingkari barang yang dipinjamnya). Atas perbuatan penggelapan juga berlaku ketentuan hukuman *had* pemotongan tangan.

[illegible]



peristiwa yang terdapat *naş* untuk menyamakan dua peristiwa pada hukum.

Adapaun rukun qiyas yaitu:

1. Al- Ashlu yaitu sesuatu yang ada *naş* hukumanya.
2. Al-Far'u yaitu sesuatu yang tidak ada *naş* hukumanya.
3. Hukum Ashl yaitu hukum syara' yang ada *naş*-nya pada pokoknya dan ia dimaksudkan menjadi hukum pada al-Far'u.
4. Illat yaitu sesuatu sifat yang dijadikan dasar untuk membentuk hukum pokok dan berdasarkan adanya keberadaan sifat itu pada al-far'u. Maka ia disamakan dengan pokoknya dari segi hukumnya.<sup>69</sup>

Mengqiyaskan penggelapan dengan *ghulul*, maka dapat dijelaskan rukun qiyas yaitu : Al-Ashlu yaitu: *ghulul*, Al-Far'u: penggelapan, Hukum Ashl (haram), illat (memiliki barang milik orang lain dengan tidak benar). Sedangkan pengertian *ghulul* ialah mencuri harta rampasan perang (*ghanimah*) atau menyembunyikan sebagian-Nya (untuk dimiliki) sebelum menyampaikan ke tempat pembagian.<sup>70</sup>

Berdasarkan pengertian tersebut, menunjukkan bahwa *ghulul* terjadi pada penggelapan harta rampasan perang. Hal tersebut sesuai dengan QS. Al-Imran: 161 :

<sup>69</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta,tt), 68.

<sup>70</sup> Abu Fida' Abdur Rafi. *Terapi Penyakit Korupsi dengan Tazkiyatun Nafs (Penyucian Jiwa)*, (Jakarta: Republik, 2006), 30.

وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَمَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ

مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿١٦١﴾

“tidak mungkin seorang Nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Barangsiapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang itu, Maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu, kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan (pembalasan) setimpal, sedang mereka tidak dianiaya.”

Uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa tindakan terdakwa dalam perkara nomor 15/Pid.Sus/2015/PN.Pwr tentang penggelapan sepeda motor kredit. Dengan adanya niat, perbuatan, keadaan terdakwa dan akibat dari tindakan terdakwa dalam Ruang Lingkup Hukum Pidana Islam termasuk *jarimah ta'zir* dan termasuk *jarimah* yang ditentukan al-Qur'an dan al-Hadis, namun tidak ditentukan sanksinya. Untuk menentukan sanksi *jarimah ta'zir* diberikan kepada hakim untuk memilih hukuman-hukuman mana yang sesuai dengan macam *jarimah ta'zir* serta keadaan terdakwa, karena tidak diatur dengan jelas pada al-Qur'an dan al-Hadis.

# BAB V

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil analisis, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Majelis hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada terdakwa tidak hanya bertujuan untuk membuat efek jera kepada terdakwa tetapi juga bertujuan edukatif yakni pembelajaran agar terdakwa sadar bahwa yang dilakukan salah dan tidak mengulangnya lagi. Berdasarkan amar putusan Nomor 15/Pid.Sus/2015/PN.Pwr terdakwa Rio Chandra bin Nurani Bramantya terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah memenuhi unsur-unsur pasal 372 KUHP tentang penggelapan, dengan dijatuhi hukuman selama 10 (sepuluh) bulan penjara, terdakwa tetap berada dalam tahanan, dan adanya barang bukti berupa 1 (satu) lembar Serifikat Jaminan Fidusia Nomor W13.00192796.AH.05.01 tahun 2014 tanggal 07 Maret 2014, 1 (satu) bundel Akta Jaminan Fidusia Nomor : 338 tanggal 05 Maret 2014 (dikembalikan kepada pihak PT. ADIRA FINANCE), 1 (satu) buah surat pernyataan atas nama Rio Chandra bin Nurani Bramantya, terdakwa juga dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah)
2. Tindak pidana penggelapan sepeda motor kredit dalam hukum pidana Islam yang dilakukan oleh terdakwa Rio Chandra bin Nurani Bramantya termasuk

nomor 15/Pid.Sus/2015/PN.Pwr, hakim telah menjatuhkan hukuman yang juga berarti menahan atau mencegah sepuluh) bulan yang berdasarkan keterangan saksi-saksi telah dihadirkan oleh jaksa penuntut umum di Pengadilan Negeri Sukoharjo. Kalau dikaitkan dengan hukum yang terungkap. Kalau dikaitkan dengan hukum sesuai, karena hukuman tindak pidana penggelapan menentukan besar kecilnya adalah *ulil amri* dalam hal ini di pengadilan, dan termasuk dalam jenis hukuman penjara karena pelaku belum pernah dihukum dan baru kali pertama melakukan tindak pidana.

nomor 15/Pid.Sus/2015/PN.Pwr, hakim telah menjatuhkan hukuman yang juga berarti menahan atau mencegah sepuluh) bulan yang berdasarkan keterangan saksi-saksi telah dihadirkan oleh jaksa penuntut umum di Pengadilan Negeri Sukoharjo. Kalau dikaitkan dengan hukum yang terungkap. Kalau dikaitkan dengan hukum sesuai, karena hukuman tindak pidana penggelapan menentukan besar kecilnya adalah *ulil amri* dalam hal ini di pengadilan, dan termasuk dalam jenis hukuman penjara karena pelaku belum pernah dihukum dan baru kali pertama melakukan tindak pidana.

nomor 15/Pid.Sus/2015/PN.Pwr, hakim telah menjatuhkan hukuman yang juga berarti menahan atau mencegah sepuluh) bulan yang berdasarkan keterangan saksi-saksi telah dihadirkan oleh jaksa penuntut umum di Pengadilan Negeri Sukoharjo. Kalau dikaitkan dengan hukum yang terungkap. Kalau dikaitkan dengan hukum sesuai, karena hukuman tindak pidana penggelapan menentukan besar kecilnya adalah *ulil amri* dalam hal ini di pengadilan, dan termasuk dalam jenis hukuman penjara karena pelaku belum pernah dihukum dan baru kali pertama melakukan tindak pidana.

- nomor 15/Pid.Sus/2015/PN.Pwr, hakim telah menjatuhkan hukuman yang juga berarti menahan atau mencegah sepuluh) bulan yang berdasarkan keterangan saksi-saksi telah dihadirkan oleh jaksa penuntut umum di Pengadilan Negeri Sukoharjo. Kalau dikaitkan dengan hukum yang terungkap. Kalau dikaitkan dengan hukum sesuai, karena hukuman tindak pidana penggelapan menentukan besar kecilnya adalah *ulil amri* dalam hal ini di pengadilan, dan termasuk dalam jenis hukuman penjara karena pelaku belum pernah dihukum dan baru kali pertama melakukan tindak pidana.

Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia. Maka, majelis hakim harus memperhatikan ketentuan-ketentuan dari segi formil maupun materiil. Lebih teliti dalam menjatuhkan hukuman, khususnya penggunaan pasal dan Undang-Undang yang digunakan. Karena untuk membuat masyarakat percaya dalam persidangan adalah keprofesionalan dan keadilan dalam menjalankan tugas bagi Aparat penegak hukum.

2. Perlu adanya sosialisasi pemahaman hukum terhadap masyarakat, bahwa suatu tindak pidana apapun baik besar maupun kecil akan diproses melalui persidangan, bisa dilakukan oleh aparat penegak hukum, atau mahasiswa-mahasiswa hukum, seperti halnya tindak pidana penggelapan sepeda motor kredit.

hammad bin Isma'il. *Subul Al-Salam jilid IV*, Al-Bab Al-Halabi, 1960.

*radilan Islam*, Jakarta: Amzah, 2012.

*Jinayah, Upaya Menanggulangi dalam Islam*, Jakarta: PT Bina Ilmu, 1996.

*Uthar VI*, Surabaya : PT Bina Ilmu, 1986.

Abu Abdul. *Suap, Dampak dan Bahayanya*. Jakarta: PT Bina Ilmu, 1996.

*man Pidana Sjari'at Islam Menurut Adjaran Ahlu Sunnah*, Jakarta: PT Bina Ilmu, 1970

*Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: PT Bina Ilmu, 1996.

arsisius Sigit. *Tinjauan Yuridis Kriminologis Terhadap Penegakan Hukum Pidana di PT. Federal International Finance*, Yogyakarta, Universitas Atmajaya, 10 Oktober 2012.

- hammad bin Isma'il. *Subul Al-Salam jilid IV*, Al-Bab Al-Halabi, 1960.
- radilan Islam*, Jakarta: Amzah, 2012.
- Jinayah, Upaya Menanggulangi dalam Islam*, Jakarta: PT Bina Ilmu, 1996.
- Uthar VI*, Surabaya : PT Bina Ilmu, 1986.
- Abu Abdul. *Suap, Dampak dan Bahayanya*. Jakarta: PT Bina Ilmu, 1996.
- man Pidana Sjari'at Islam Menurut Adjaran Ahlu Sunnah*, Jakarta: PT Bina Ilmu, 1970
- Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: PT Bina Ilmu, 1996.
- arsisius Sigit. *Tinjauan Yuridis Kriminologis Terhadap Penegakan Hukum Pidana di PT. Federal International Finance*, Yogyakarta, Universitas Atmajaya, 10 Oktober 2012.

Marsum. *Fiqh Jinayat, Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: BAG. Penerbitan FH UII, 1991.

Marsum. *Jarīmah Ta'zir Perbuatan Dosa dalam Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta : Fakultas Hukum UII, 1988.

Muhammad, Akhsin Sakho. *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam III*, Bogor : PT Karisma ilmu.

Munajat, Makhrus. *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Teras, 2009.

Muslich, Ahmad Wardi. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

Muslich. Ahmad Wardi. *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Rafi. Abu Fida' Abdur. *Terapi Penyakit Korupsi dengan Tazkiyatun Nafs (Penyucian Jiwa)*, Jakarta: Republik, 2006.

Sabiq. Sayyid. *Fikih Sunnah jilid II*, Bandung: PT Alma'arif, 2004

Sabiq. Sayyid. *Fikih Sunnah, (Moh. Nabhan Husein)*, Jilid IV, Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1993.

Sahid. *Epistemologi Hukum Pidana Islam, Dasar-dasar Fiqh Jiayah*, Surabaya : Pustaka Idea

Santoso, Topo. *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syari'at dalam Wacana dan Agenda*, Jakarta: Gema Insani Press, 2003.

Soesilo, R. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*. Bogor: Politeia, 1991.

Soesilo, R. *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*. Bogor : PT. Karya Nusantara, 1984.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2010.



Witanto, D.Y. *Hukum Jaminan Fidusia dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen (Aspek Perikatan, Pendaftaran, dan Eksekusi)*, Bandung: CV. Mandar Maju, 2015.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

Direktori Putusan Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 15/Pid.Sus/2015/PN.Pwr  
tentang penggelapan sepeda motor kredit

